

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan yang dilakukan setiap pemerintah daerah tentunya memerlukan pembiayaan yang tidak sedikit jumlahnya. Hal ini dimaksudkan demi menunjang keberlangsungan pembangunan bagi daerah tersebut. Sesuai dengan kebijakan Otonomi Daerah sebagaimana diatur dalam UU Nomor 22 Tahun 1999 adalah memberikan kewenangan yang luas kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat daerah menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat setempat.¹ Selain itu pemerintah daerah juga harus memperhatikan keadaan keuangan daerah agar pembangunan yang direncanakan dapat terlaksana.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diperoleh setiap daerah memiliki tingkat pendapatan yang berbeda-beda. Hal ini bergantung pada kemampuan dari setiap daerah dalam mengelola

¹Sjahrani Matajaya, *Strategi Memperbesar Investasi di Daerah* (Jakarta: NM Press, 2004), 23.

sumberdaya serta potensi yang tersedia di daerah tersebut. Salah satu sumber pendapatan daerah ialah berasal dari pajak daerah dan perolehan deviden BUMD.

Pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.² Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 1 Tahun 2011 dimana pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.³

Dalam rangka pemberdayaan ekonomi kerakyatan serta pengembangan potensi otonomi daerah yang dikaitkan dengan otonomi daerah itu sendiri, kini perlu dimunculkan satu lembaga ekonomi yang selama ini belum mendapatkan perhatian khusus,

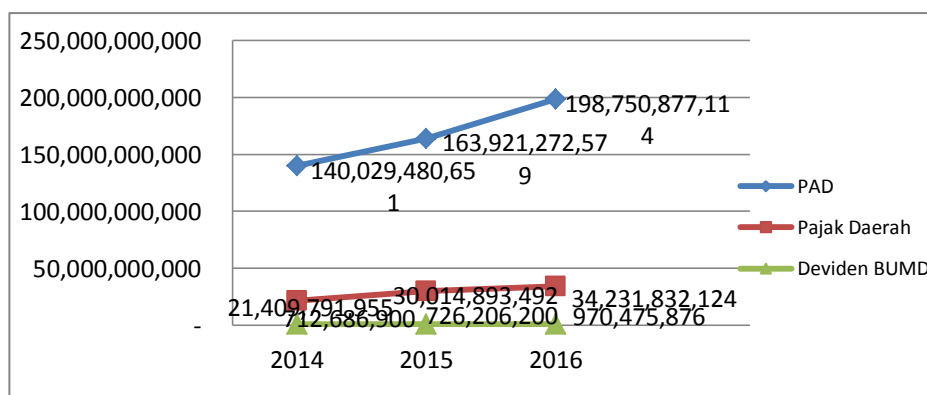
²M. Aries Djaenuri, *Hubungan Keuangan Pusat-Daerah* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 88.

³Perda-Pandeglang-No-1-Tahun-2011.pdf, <http://banten.bpk.go.id>

yaitu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Badan ini merupakan milik dan diberdayakan oleh pemerintah dari masing-masing daerah setempat.⁴

BUMD memiliki peranan yang tidak kalah penting bagi pemerintah daerah. Hal ini dikarenakan perolehan deviden atas penyertaan modal yang dilakukan pemerintah daerah masuk kedalam salah satu sumber pendapatan asli daerah (PAD) pemerintah daerah itu sendiri. Meskipun terkadang perolehan deviden BUMD ini tidak terlalu besar dibandingkan sumber pendapatan asli daerah yang lainnya.

Gambar 1.1
Grafik perolehan PAD, Pajak Daerah dan Deviden BUMD
Kabupaten Pandeglang Tahun 2014-2016



Sumber: (Data Diolah)

⁴Sjahrani Matajaya, *Strategi Memperbesar Investasi di Daerah* (Jakarta: NM Press, 2004), 20.

Merujuk pada gambar 1.1, perolehan pajak daerah Kabupaten Pandeglang mengalami kenaikan pendapatan setiap tahunnya dengan perolehan tertinggi pada tahun 2016 sekitar Rp. 34 Milyar. Begitu pula dengan deviden BUMD, dimana perolehan tertinggi deviden BUMD diperoleh pada tahun 2016 dengan nilai perolehan hampir Rp. 1 Milyar. Sama halnya dengan pajak daerah dan deviden BUMD, pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Pandeglang juga mengalami kenaikan perolehan pendapatan setiap tahunnya dengan perolehan tertinggi pada tahun 2016 yaitu sebesar hampir Rp. 200 Milyar.

Kenaikan pajak daerah dan deviden BUMD pada setiap tahunnya ini diikuti juga dengan kenaikan pendapatan asli daerah (PAD) disetiap tahunnya. Meskipun demikian, selisih kenaikan PAD yang terjadi setiap tahunnya yang dapat dikatakan mengalami kenaikan sangat drastis dari tahun ke tahun ini masih sangat jauh apabila dibandingkan dengan selisih kenaikan pajak daerah dan deviden BUMD yang hanya mengalami sedikit kenaikan setiap tahunnya. Hal ini jelas terlihat dari jumlah perolehan antara pajak daerah dan deviden BUMD dengan pendapatan asli daerah disetiap tahunnya.

Berdasarkan hasil penelitian Meilda Ellysa Putri dan Sri Rahayu menunjukkan bahwa secara simultan terdapat pengaruh dari pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah dan secara parsial pajak daerah berpengaruh signifikan secara positif terhadap pendapatan asli daerah.⁵ Begitupula hasil penelitian Wildah Mafaza,dkk. yang menunjukkan bahwa variabel pajak daerah mempunyai kontribusi dalam pendapatan asli daerah.⁶

Menurut Luzy Okta Dila (2014) hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa penerimaan pajak daerah berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan asli daerah di kabupaten dan kota di wilayah Indonesia.⁷ Sama halnya dengan hasil penelitian sebelumnya, hasil yang diperoleh Arif Nugroho Rachman juga menunjukkan bahwa kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Boyolali selama rentang waktu empat tahun cenderung meningkat. Hal ini memberikan dampak positif

⁵ Meilda Ellysa Putri dan Sri Rahayu, "Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah", *e-Proceeding of Management*, Vol.2, No.1, (April, 2015), 281.

⁶ Wildah Mafaza, dkk., "Kontribusi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Dalam Pendapatan Asli Daerah", *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*, Vol. 11, No.1, (2016), 1.

⁷ Luzy Okta Dila, "Analisis Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Pada Kota Dan Kabupaten Di Wilayah Indonesia", (Skripsi, Universitas Bengkulu, 2014).

bagi PAD pemerintah Kabupaten Boyolali. Adapun kontribusi laba BUMD terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Boyolali memiliki kontribusi yang kecil.⁸ Sesuai dengan hasil dari Arif Nugroho Rachman, penelitian Rissa Amosea juga menunjukkan bahwa ternyata laba BUMD secara individual tidak secara signifikan berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah.⁹

Mengacu pada hasil penelitian diatas serta melihat permasalahan yang ada, penulis tertarik untuk membahas lebih dalam mengenai **“PENGARUH PAJAK DAERAH DAN DEVIDEN BUMD TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KABUPATEN PANDEGLANG”**.

B. Identifikasi Masalah

Pendapatan asli daerah terdiri dari beberapa sumber pendapatan diantaranya pajak daerah dan deviden BUMD. Setiap daerah memiliki tingkat pendapatan asli daerah yang berbeda-beda. Hal ini tergantung pihak pemerintah daerah itu sendiri dalam mengelola sumber daya yang ada. Maka seberapa besar

⁸ Arif Nugroho Rachman, ”Analisis Kontibusi Pajak Daerah Dan Laba BUMD Terhadap Pendapatan Asli Daerah”, (Skripsi, Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta, 2007), 60.

⁹ Rissa Amosea, ”Pengaruh Kontribusi Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Milik Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah”, (Skripsi, Politeknik Negeri Bandung, 2012).

pengaruh pajak daerah dan deviden BUMD ini berpengaruh dalam membantu meningkatkan pendapatan bagi daerah khususnya pemerintah daerah Kabupaten Pandeglang.

C. Pembatasan Masalah

Pembahasan dalam penelitian ini terbatas hanya pada pajak daerah dan deviden BUMD untuk variabel independen dan pendapatan asli daerah (PAD) untuk variabel dependen. Adapun rentang waktu yang digunakan ialah dari tahun 2014-2016.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

- 1) Bagaimana pendapatan Pajak Daerah berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pandeglang ?
- 2) Bagaimana Deviden BUMD berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pandeglang ?
- 3) Bagaimana pendapatan Pajak Daerah dan Deviden BUMD secara bersama-sama berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pandeglang ?

- 4) Bagaimana pandangan ekonomi islam tentang pajak daerah dan deviden BUMD ?

E. Tujuan dan Manfaat penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas tujuan dari penelitian yang dilakukan ialah :

- a) Untuk menganalisis bagaimana pendapatan Pajak Daerah berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pandeglang.
- b) Untuk menganalisis bagaimana Deviden BUMD berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pandeglang
- c) Untuk menganalisis bagaimana pengaruh dari pendapatan Pajak Daerah dan Deviden BUMD secara bersama-sama terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pandeglang.
- d) Untuk mengetahui bagaimana pandangan ekonomi Islam tentang Pajak Daerah dan Deviden BUMD terhadap Pendapatan Asli Daerah.

2. Manfaat Penelitian

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

- a) Secara teoritis diharapkan penelitian ini dapat memberikan serta menambah wawasan dalam hal keilmuan dalam bidang-bidang terkait terutama yang berhubungan dengan pembahasan yang peneliti lakukan sehingga dapat dijadikan sebagai referensi atau pegangan diwaktu yang akan datang.
- b) Secara praktis diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi instansi terkait terutama pemerintah daerah dalam menerapkan kebijakan yang berkaitan dengan Pajak Daerah dan Deviden BUMD dalam meningkatkan PAD khususnya bagi pemerintah daerah Kabupaten Pandeglang .

F. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penulisan penelitian ini terdiri atas beberapa bab, untuk memudahkan penyusunan dan penulisan laporan. Adapun sistematika penulisan adalah sebagai berikut :

Bab I pendahuluan, bab ini memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, pembatasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

Bab II landasan teori, bab ini mengemukakan penjelasan mengenai variabel-variabel dalam penelitian yang mendukung serta menjadi dasar dalam penelitian yang akan dilakukan dengan bersumberkan pada buku, artikel, dll.

Bab III metode penelitian, bab ini memuat tentang metode penelitian, penentuan lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data serta teknik analisis data.

Bab IV pembahasan hasil penelitian, bab ini berisikan uraian-uraian terkait temuan dari hasil penelitian yang disertai dengan analisis data dan pembahasannya.

Bab V kesimpulan dan saran, bab ini memuat kesimpulan dan saran-saran yang dihasilkan sebagai implikasi dari kesimpulan tersebut.